

Suiting Up Good Faith: Good Faith Through the Lens of Investors vs. Host States in the Assessment of Investment Lawfulness as Seen in *Churchill v. Indonesia*

Author:

Amelda Sabrina Law¹

ABSTRACT

The principle of good faith is especially pertinent within international investment agreements that confer enforceable rights upon investors as third-party beneficiaries. Despite their exclusion from treaty negotiations, investors remain bound by good faith obligations arising from the treaty. Tensions emerge when the content and scope of good faith are interpreted divergently by investors and host states. This divergence is illustrated by the *Churchill Mining and Planet Mining v. Indonesia* dispute, which concerned forged mining concession licenses. This study examines how competing constructions of good faith operate within investor–state dispute settlement through the lens of Roberts’ *Triangular Treaty Framework*.

The study adopts a normative juridical (doctrinal) methodology, focusing on a systematic analysis of primary legal texts, including relevant bilateral investment treaties, the ICSID arbitral award in *Churchill Mining*, and general principles of international law. Through close textual interpretation and jurisprudential analysis, the research examines how good faith is articulated, invoked, and constrained in investment arbitration, with particular attention to the allocation of rights and obligations among investors, host states, and home states.

The analysis reveals that international investment agreements embody a triangular legal relationship in which investors, although primary beneficiaries, derive their rights from the consent, intent, and regulatory authority of states. Good faith operates as a guiding interpretative principle within this structure, mediating the balance between investor protection and host state interests such as economic development and sovereign regulatory autonomy. The *Churchill Mining* case demonstrates that good faith does not function as an absolute or self-standing “shield of iron” for investors; rather, its application is structurally limited by the roles, powers, and knowledge asymmetries inherent in investor–state relations.

Keywords: Law of Treaties, Foreign Direct Investment, ICSID

¹ Student at the Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (International Undergraduate Program 2022)

Menerapkan Prinsip Itikad Baik: Prinsip Itikad Baik Melalui Perspektif Investor versus Negara Tuan Rumah dalam Penilaian Keabsahan Investasi sebagaimana Terlihat dalam Kasus Churchill v. Indonesia

Penulis:

Amelda Sabrina Law²

ABSTRAK

Prinsip itikad baik sangat relevan dalam perjanjian investasi internasional yang memberikan hak yang dapat ditegakkan kepada investor sebagai pihak ketiga yang diuntungkan. Meskipun investor tidak terlibat dalam negosiasi perjanjian, mereka tetap terikat oleh kewajiban itikad baik yang timbul dari perjanjian tersebut. Ketegangan muncul ketika isi dan ruang lingkup itikad baik diinterpretasikan secara berbeda oleh investor dan negara tuan rumah. Perbedaan ini tercermin dalam sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v. Indonesia, yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan palsu. Studi ini menganalisis bagaimana konstruksi yang bertentangan mengenai itikad baik beroperasi dalam penyelesaian sengketa investor-negara melalui kerangka kerja segitiga perjanjian Roberts.

Studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif (doktrinal), dengan fokus pada analisis sistematis teks hukum primer, termasuk perjanjian investasi bilateral yang relevan, putusan arbitrase ICSID dalam kasus Churchill Mining, dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Melalui interpretasi teks yang cermat dan analisis yurisprudensial, penelitian ini mengkaji bagaimana itikad baik diartikulasikan, diajukan, dan dibatasi dalam arbitrase investasi, dengan perhatian khusus pada pembagian hak dan kewajiban di antara investor, negara tuan rumah, dan negara asal.

Analisis menunjukkan bahwa perjanjian investasi internasional mencerminkan hubungan hukum segitiga di mana investor, meskipun menjadi pihak yang paling diuntungkan, memperoleh hak-haknya dari persetujuan, niat, dan wewenang regulasi negara-negara. Itikad baik berfungsi sebagai prinsip interpretatif yang mengarahkan dalam struktur ini, menyeimbangkan antara perlindungan investor dan kepentingan negara tuan rumah seperti pengembangan ekonomi dan otonomi regulasi yang berdaulat. Kasus Churchill Mining menunjukkan bahwa itikad baik tidak berfungsi sebagai perisai besi yang mutlak atau berdiri sendiri bagi investor; sebaliknya, penerapannya secara struktural dibatasi oleh peran, wewenang, dan ketidakseimbangan pengetahuan yang melekat dalam hubungan investor-negara.

² Mahasiswa Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (International Undergraduate Program 2022)